

ANALISIS PROPORSI POPULASI PENDUDUK TERHADAP RUMAH TANGGA DENGAN HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU

Destama Einstein Shodiq

Program Studi Magister Pendidikan Sains FKIP UNS Surakarta
Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta, Indonesia
E-mail : destamaes@student.uns.ac.id

Abstrak: Permukiman adalah suatu kumpulan manusia baik di kota maupun di desa dengan aspek sosial, spiritual dan nilai-nilai budaya. Permukiman dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang ditinjau dari kelayakan rumah yang dihuni. Penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS). Kemudian, dilakukan literatur review terkait bidang kajian. Hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2022, persentase rumah tangga layak huni pada masyarakat perkotaan sebesar 64,55%, sedangkan pedesaan 55,95%. Persentase tertinggi untuk rumah tangga layak huni dalam 3 tahun terakhir menurut provinsi adalah Provinsi D.I Yogyakarta sebesar 84,32%, sedangkan terendah Provinsi Papua sebesar 27,89%.

Kata kunci : *kepadatan penduduk, permukiman layak huni*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selain itu, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia.

Daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi biasanya terjadi di daerah daerah perkotaan dimana banyak para urban yang mendatangi kota-kota tersebut. Dampak kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah penurunan kualitas penduduk (pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pekerjaan). Pendidikan yang rendah akan masuk pada pekerjaan di sektor informal dengan pendapatan yang rendah. Seseorang dengan pendapatan yang rendah, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan baik kesehatan, pangan maupun papan. Hal ini menyulitkan mereka untuk mencapai hidup yang sejahtera atau berkualitas.

Permukiman adalah suatu kumpulan manusia baik di kota maupun di desa dengan aspek sosial, spiritual dan nilai-nilai budaya

(Muta’ali & Nugroho, 2016). Permukiman dengan jumlah penduduk yang tinggi menimbulkan permasalahan seperti kelayakan hunian. Permukiman yang ditinggali biasanya dalam kategori kumuh atau layak huni. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan layak huni diartikan sebagai perumahan yang mengalami kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Indikator kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran (Sastanti & Fibriani, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, jumlah penduduk dengan kepadatan yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, Sehingga Dilakukan Penelitian Dengan Judul “Analisis Proporsi Populasi Penduduk Terhadap Rumah Tangga Dengan Hunian Layak Dan Terjangkau”

METODE

Penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS). Kemudian, dilakukan literatur

review terkait bidang kajian. Database artikel diperoleh dari *google scholar* dengan kata kunci penduduk, kawasan permukiman, permukiman kumuh, permukiman layak huni, dan permukiman terjagkau. Semua artikel yang dianalisis dari tahun 2012-2022 (10 tahun terakhir). Artikel dapat berupa jurnal terakreditasi SINTA maupun prosiding seminar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk Indonesia

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Keadaan yang semakin padat apabila jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas wilayahnya. Tujuannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi.

Berdasarkan data dari (Badan Pusat Statistik, 2022), jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil SP2020 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun dibandingkan dengan SP2010.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir

2018	2019	2020	2021	2022
264 161,6	266 911,9	270203.9	272682.5	275773.8

Data : Badan Pusat Statistika (*dalam juta)

Pada tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa, dengan luas wilayah 1,905 juta km². Kepadatan penduduk Indonesia sebesar 141 penduduk per juta km². Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi, akan tetapi kepadatan penduduknya tergolong rendah. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki daratan yang luas terdiri dari 16.056 pulau-pulau dari Sabang hingga Merauke. Pada gambar 1, dapat dilihat bahwa rata-rata

kepadatan penduduk tertinggi pada Provinsi DKI Jakarta 15.928 penduduk per km², sedangkan kepadatan terendah pada Provinsi Kalimantan Utara dengan 9 penduduk per km². Kepadatan populasi di Kalimantan Utara masing sangat rendah. Kalimantan Utara merupakan provinsi baru, pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini menyebabkan pembangunan infrastruktur yang masih rendah, sehingga arus urbanisasinya juga rendah.

Berdasarkan data sebaran penduduk antar pulau, Pulau Jawa masih menjadi Pulau terpadat di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pusat ekonomi di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa memiliki pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lebih terjamin. Hal ini memungkinkan banyak yang menetap ataupun bertransmigrasi di Pulau Jawa. Pertumbuhan penduduk yang cepat, diiringi dengan peningkatan aktivitas pembangunan yang pesat menyebabkan peningkatan permintaan berbagai kebutuhan seperti perumahan, infrastruktur, lahan, dan kebutuhan lain. Jika pertumbuhan penduduk tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

a. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan antara faktor-faktor demografi yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk baik berkurang atau bertambah, yang terjadi disuatu daerah. Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh unsur-unsur fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan penduduk). Pertumbuhan penduduk yang tinggi, di mana tingkat kelahiran penduduk masih sangat tinggi, sedangkan tingkat kematiannya juga masih tinggi namun relatif sudah jauh lebih rendah (Suhandi et al., 2018). Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan kecepatan pertumbuhan penduduk dalam bentuk angka setiap dalam kurun waktu tertentu, sedangkan pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan antara faktor-faktor demografi yang mempengaruhi perubahan jumlah

penduduk baik berkurang atau bertambah, yang terjadi disuatu daerah

(Ainy et al., 2019).



Gambar 1. Rata-rata Kepadatan Penduduk Tahun 2018-2022 Menurut Provinsi

Kepadatan penduduk yang tinggi memberikan tantangan yang kompleks ditinjau dari pembangunan dan infrastruktur. Jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan meningkatnya kebutuhan hidup seperti pangan, air, permukiman, dan lainnya. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan juga menimbulkan ketidakseimbangan ketersediaan sumber daya alam terhadap kebutuhan hidup manusia. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas hidup manusia. Jika ditinjau dari aspek social, kepadatan penduduk yang tinggi juga harus menyediakan lapangan kerja yang cukup luas agar permasalahan seperti pengangguran kemiskinan, ketimpangan, dan kerenggangan sosial tidak terjadi.

Dampak Kepadatan Penduduk terhadap Pemukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga akan menyebabkan kebutuhan akan lahan sebagai ruang untuk tempat aktivitas seperti lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, tempat pertanian, dan sebagainya semakin meningkat, sementara potensi dan luas lahan yang tersedia sangat terbatas. Hal ini berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman pada masa yang akan datang (Akhirul et al., 2020). Permukiman merupakan unsur penting dalam menentukan kualitas hidup di dalam masyarakat. Permukiman yang berfungsi tempat tinggal harus memiliki kelayakan sebagai hunian layak huni.



Data : Badan Pusat Statistika

Gambar 2. Grafik Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Daerah Tempat Tinggal

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan dan pedesaan terdapat perbedaan. Namun, keduanya sebanding artinya ketika di perkotaan mengalami penurunan maka, pedesaan juga mengalami penurunan dan sebaliknya. Kriteria yang digunakan BPS untuk menentukan kelayakan hunian di masyarakat perkotaan atau pedesaan antara lain,

1. Ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat sebagai berikut
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng.
 - b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/ bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$.
3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.
4. Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau

bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Rumah layak huni merupakan wadah penampung ideal sebuah keluarga dalam suatu perkotaan maupun pedesaan. Kawasan perkotaan memiliki hunian yang layak, dibandingkan dengan di pedesaan. Namun, faktanya tidak semua masyarakat telah memiliki Rumah Layak Huni dikarenakan beberapa faktor yang kurang mendukung masyarakat seperti mdengan berpenghasilan rendah, jarak tempuh untuk mendapatkan air bersih yang relatif jauh, serta fasilitas MCK yang tergolong kurang memadai (Guterres, 2017). Hal tersebut yang menjadikan masyarakat perkotaan memiliki persentase rumah layak huni yang lebih tinggi. Masyarakat perkotaan memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari pedesaan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Kota yang layak ditinggali atau kota layak huni adalah suatu kota yang dapat

mengakomodir seluruh aktivitas penduduk yang tinggal didalamnya, mulai dari pelayanan/fasilitas fisik maupun non fisik suatu tempat, skala tempat tinggal, termasuk kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan penduduk kota (Nugroho et al., 2022).

Rumah tidak layak huni pada umumnya berkaitan dengan permukiman kumuh dan banyak dijumpai masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun social (Yahya et al., 2020).

Menurut data persentase rumah layak huni tahun 2019-2022 ditinjau dari provinsi, disajikan pada gambar 2.



Data : diolah dari Badan Pusat Statistika

Gambar 2. Persentase Rata-rata Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Provinsi Tahun 2019-2021

Berdasarkan data tersebut, provinsi yang memiliki rumah layak huni tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan persentase sebesar

84,32%, sedangkan rumah layak huni terendah pada Provinsi Papua dengan persentase 27,89%. Menurut (Adhitya et al., 2020) tingkat

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati posisi pertama dengan angka persentase tertinggi di Pulau Jawa dan bahkan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY dimana Provinsi DIY pada tahun 2014 sampai dengan 2018 memiliki indeks gini tertinggi di Indonesia.

SIMPULAN

Permukiman merupakan suatu wilayah yang ditinggali. Oleh karena itu, permukiman harus memiliki kelayakan untuk dapat dihuni sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga layak huni pada masyarakat perkotaan sebesar 64,55%, sedangkan pedesaan 55,95%. Persentase tertinggi untuk rumah tangga layak huni menurut provinsi adalah Provinsi D.I Yogyakarta sebesar 84,32%, sedangkan terendah Provinsi Papua sebesar 27,89%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, B., Badriah, L. S., & Suprpto, S. (2020). Pengaruh Pariwisata terhadap Ketimpangan Pendapatan: Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 456. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.958>
- Ainy, H., Nurrochmah, S., & Katmawanti, S. (2019). Hubungan Antara Fertilitas, Mortalitas, Dan Migrasi Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk. *Preventia : The Indonesian Journal of Public Health*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.17977/um044v4i1p15-22>
- Akhirul, Yelfida, W., Iswandi, U., & Erianjoni. (2020). Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), 76–84.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Analisis Profil Penduduk Indonesia*. <https://www.bps.go.id/>
- Guterres, J. A. D. (2017). Pemanfaatan Metode Saw Dan Topsis Sebagai

Media Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni. *Prosiding SINTAK 2017*, 51–56. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/sintak/article/view/6512>

- Muta'ali, L., & Nugroho, Arif R. (2016). *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Pasa ke Masa*. Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, F. I., Setyono, D. A., & Kurniawan, E. B. (2022). Identifikasi Kriteria Layak Huni Permukiman Di Kota Malang. *Tata Kota Dan Daerah*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2022.014.01.1>
- Sastanti, S. Y., & Fibriani, C. (2019). Analisis Tingkat Permukiman Kumuh Menggunakan Metode AHP Berbasis SIG pada Kota Magelang. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 5(1), 69–78. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v5i1.2019.69-78>
- Suhandi, N., Putri, E. A. K., & Agnisa, S. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 9(2), 77–82. <https://doi.org/10.36982/jig.v9i2.543>
- Yahya, F., Prabawa, S. E., & ... (2020). Pemetaan Kawasan Wilayah Permukiman Rumah Tidak Layak Huni Di Perdesaan (Studi Kasus: Kecamatan Palengaan Dan Kecamatan Batumarmar, Kabupaten : *Jurnal Geodesi Dan ...*, 3(2). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/elipsoida/article/view/9205>